



**PENGUMUMAN**  
**Hasil Penilikan Ke-3 Penilaian Kinerja PHPL**

Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) PT Mutuagung Lestari menyampaikan hasil Penilikan ke-3 Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) melalui audit jarak jauh (*Remote Auduit*) pada :

Nama Auditee : PT Erna Djuliawati  
Lokasi : Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah  
IUPHHK- HA : Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.15/KPTS-IV/1999 Tanggal 18 Januari 1999  
Luas : ± 184.206 Ha  
Tanggal Penilaian : 14-16, 19-22 Oktober 2020

dengan hasil kinerja berpredikat “**Baik**” sehingga Sertifikatnya dinyatakan tetap berlaku (06 November 2017 s/d 05 November 2022)

Kegiatan penilaian dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

LPPHPL PT Mutuagung Lestari  
(LPPHPL-008-IDN)  
Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok  
Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email: [forestry@mutucertification.com](mailto:forestry@mutucertification.com)

Depok, 18 November 2020



**Bambang Gunardjito**  
**KA OP SBU Sertifikasi Kehutanan**

**RESUME HASIL PENILIKAN KE-3 (TIGA)  
PENILAIAN KINERJA PHPL  
PT ERNA DJULIAWATI**

**(1) Identitas LPPHPL**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-008-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.  
Website: [www.mutucertification.com](http://www.mutucertification.com)
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email : [forestry@mutucertification.com](mailto:forestry@mutucertification.com)
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal PHPL No.  
P.14/PHPL/SET/4/2016 (Lampiran 1.1. dan 2.1.)
- g. Tim Audit : Fauzi Prima Sanusi, S.Hut (Lead Auditor /Ekologi)  
Ir. Suwanto (Auditor Prasyarat)  
Muhammad Ridwan S.Hut (Auditor Produksi)  
Ahmad Kosasih, SP (Auditor Sosial)  
Rinaldy Ramadhan D, S.Hut. (Auditor VLK)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Tony Arifarahman  
Taufik Margani  
Bambang Gunarjito

**(2) Identitas Auditee**

- a. Nama Pemegang Izin : PT ERNA DJULIAWATI
- b. Nomor & Tanggal SK : Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 15/Kpts-  
IV/1999
- c. Luas dan Lokasi : 184.206 Ha,  
Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah
- d. Alamat Kantor : Lyman Wing Kota BNI, Jl. Jenderal Sudirman Kav.1, Karet  
Tengsin, Jakarta Pusat 10220  
Jl. Adi Sucipto Km-5, Pontianak, Kalimantan Barat
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (0561) 739777
- f. Pengurus : Indradi Kusuma, S.H. (Komisaris Utama)  
Leopard Lyman (Komisaris)  
Ir. Iwan Djuanda (Direktur Utama)  
Ir. Soeparto (Direktur)  
Ir. Maman Surachman (Direktur)  
David Lie (Direktur)
- g. Nomor S-PHPL : LPPHPL-008/MUTU/FM-006

**(3) Ringkasan Tahapan**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	12 Oktober 2020 Kementerian LHK	Koordinasi KLHK dilakukan melalui sambungan telepon untuk mendapatkan informasi mengenai kinerja PT Erna Djuliawati dalam satu tahun terakhir.
	14 Oktober 2020 Kantor Dinas Kehutanan Provinsi KALTENG dan BPHP Wilayah X di Palangkaraya	Tim audit melakukan koordinasi dengan beberapa instansi pemerintah yaitu: BPHP Wilayah X di Palangkaraya dan Dinas Kehutanan Provinsi KALTENG, melalui media zoom meeting. Koordinasi dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai kinerja PT Erna Djuliawati dalam satu tahun terakhir.
	23 Oktober 2020, Kantor Dinas Kehutanan Provinsi KALTENG dan BPHP Wilayah X di Palangkaraya	Tim audit melakukan koordinasi dengan beberapa instansi pemerintah yaitu: BPHP Wilayah X di Palangkaraya dan Dinas Kehutanan Provinsi KALTENG, melalui media zoom meeting. Koordinasi dilakukan untuk menyampaikan hasil sementara hasil penilaian lapangan.
Konsultasi Publik	-	-
Pertemuan Pembukaan	14 Oktober 2020, Di Depok dan Base Camp Bukit Beruang PT Erna Djuliawati	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertemuan Pembukaan dilakukan melalui media Zoom Meeting</li> <li>• Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit Penilikan ke-3 PHPL di PT Erna Djuliawati</li> <li>• Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan</li> <li>• Konfirmasi isi dari rencana audit/Audit Plan yang sudah disampaikan kepada Auditee oleh PT Mutuagung Lestari</li> <li>• Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>• Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>• Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>• Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari Auditee yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>• Meminta agar Auditee dan tim audit dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>• Meminta agar manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan informasi yang dibutuhkan pada masing-masing indikator dengan waktu wawancara sesuai dengan yang tercantum dalam</li> </ul>

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		jadwal audit. • Status dan definisi dari temuan audit yang digunakan. • Penandatanganan Berita Acara Pembukaan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	14 -16 Oktober s/d 19-22 Oktober 2018, di Depok dan Base Camp Bukit Beruang PT Erna Djuliawati	Verifikasi dokumen dan wawancara melalui media Zoom Meeting dan WhatsApp Group, Verifikasi hasil uji petik lapangan yang diserahkan oleh Auditee, sasaran wawancara adalah karyawan dan masyarakat, serta seluruh bagian organisasi PT Erna Djuliawati
Pertemuan Penutupan	22 Oktober 2020, Depok dan Base Camp Bukit Beruang PT Erna Djuliawati	• Dilakukan melalui media Zoom Meeting • Penyampaian status temuan atau rekomendasi tahun sebelumnya (Penilaian 2 tahun 2019) • Penyampaian hasil sementara penilaian dan rekomendasi yang harus dilakukan untuk perbaikan kinerja PHPL • Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	11 November 2020, Kantor LPPHPL Mutuagung Lestari	Diputuskan bahwa PT Erna Djuliawati dinyatakan lulus dan dapat melanjutkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) sesuai Standar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P. 30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Dirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 dengan predikat "Baik".

**(4) Resume Hasil Penilaian**

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>1. Prasyarat</b>		
<b>Indikator 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA</b>	<b>BAIK</b>	
Verifier 1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP, SK IUPHHK-HA, Pedoman TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB)	Baik	Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan, terdiri dari akta pendirian perusahaan, akta perubahan terakhir akta Nomor : 14 tanggal 31 Juli 2019 yang dibuat oleh Notaris Rosita Rianauli Sianipar SH.MKn, SK IUPHHK-HA, Pedoman TBT, Buku Laporan TBT, Peta TBT, BATB dan SK Pengesahan batas definitif (Pengukuhan) berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 59/Kpts-II/93 tanggal 11 Pebruari

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		1993 dan Keputusan Menteri Kehutanan No. 3173/Kpts/VII-KP/2003 tanggal 4 Juli 2003.
Verifier 1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)	Baik	Realisasi tata batas areal kerja IUPHHK PT Erna Djuliawati telah mencapai 100% (tata batas telah temu gelang) dengan panjang 514.844 meter, dan telah mendapat Pengesahan batas definitif (Penguakuan) berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 59/Kpts-II/93 tanggal 11 Pebruari 1993 dan Keputusan Menteri Kehutanan No. 3173/Kpts/VII-KP/2003 tanggal 4 Juli 2003.
Verifier 1.1.3 Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB).	Sedang	<p>Letak areal kerja PT Erna Djuliawati pada umumnya berbatasan dengan pemegang izin lainnya dan hutan lindung. Eksistensi areal kerja sudah mendapat persetujuan dari menteri kehutanan dan perkebunan tahun 1993, namun adanya selisih pergeseran antar peta kerja dengan Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan serta Wilayah Tertentu yang ditunjuk sebagai Kawasan Hutan di Provinsi Kalimantan Tengah - Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.529/Menhut-II/2012 tanggal 25 September 2012, menjadi sumber konflik batas dengan areal kerja yang telah ditata batas terlebih dahulu di lapangan dan telah mendapat SK Penguakuan.</p> <p>Terhadap adanya pergeseran antar peta tersebut PT Erna Djuliawati telah melakukan koordinasi dengan instansi terkait. Berdasarkan Surat Kepala BPKH Wilayah XXI Nomor : 392/BPKH.XXI/PKH/UM/9/2019 tanggal 12 September 2019 perihal Tanggapan atas permohonan pemeriksaan batas di lapangan pada areal kerja HPHTI-TPTJ PT Erna Djuliawati, BPKH merencanakan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan batas areal kerja PT Erna Djuliawati pada akhir bulan September atau awal bulan Oktober 2019.</p> <p>Terdapat aktifitas yang dapat mengganggu eksistensi areal kerja IUPHHK PT Erna Djuliawati, berupa perladangan masyarakat. Data Februari 2017 seluas 461,47 Ha, Data Januari 2018 seluas 438,92 Ha, Data Januari 2019 seluas 479,47 Ha, Data Januari 2020 seluas 453,52 Ha. PT Erna Djuliawati telah melakukan upaya pencegahan terhadap adanya aktivitas perladangan melalui kegiatan sosialisasi dan patroli pengamanan hutan.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i> ).	Baik	Berdasarkan hasil overlay Peta SK IUPHHK PT Erna Djuliawati dengan Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan serta Wilayah Tertentu yang Ditunjuk sebagai Kawasan Hutan di Provinsi Kalimantan Tengah (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.529/Menhut-II/2012 tanggal 25 September 2012), diketahui bahwa terdapat perubahan fungsi kawasan yang disebabkan adanya selisih pergeseran antar peta kerja dengan Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan serta Wilayah Tertentu yang ditunjuk sebagai Kawasan Hutan di Provinsi Kalimantan Tengah. Terdapat perubahan dokumen perencanaan periode 2021 s/d 2030 berupa dokumen RKUPHHK-HA pada Hutan Produksi Berbasis IHMB Periode 2021 s.d 2030 PT Erna Djuliawati yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.808/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/2/2020 Tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala Periode Tahun 2021-2030 Atas Nama PT. Erna Djuliawati Provinsi Kalimantan Tengah.
Verifier 1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i> ).	Baik	Terdapat penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan yang ada di dalam areal kerja PT Erna Djuliawati. Terhadap adanya penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan tersebut, terdapat bukti upaya pemegang izin untuk mendata dan melaporkan penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan kepada instansi yang berwenang yaitu Dirjen PHPL dan tembusannya disampaikan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, BPHP Wilayah X Kalimantan Tengah, dan APHI di Jakarta. Ada upaya pemegang izin untuk mencegah penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan tanpa izin.
<b>Indikator 1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK-HA</b>	<b>BAIK</b>	
Verifier 1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL	Baik	PT Erna Djuliawati telah memiliki dokumen visi misi tertulis yang legalitasnya dituangkan pada naskah tertulis yang ditandatangani Direktur Utama pada tanggal 25 Juni 2012, dan dituangkan pada dokumen Revisi RKU Periode 2011 s/d 2020. Visi misi PT Erna Djuliawati telah sesuai dengan kerangka

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		PHPL karena telah mencakup kelestarian kelola produksi, ekologi dan sosial.
Verifier 1.2.2. Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan	Baik	Visi misi perusahaan PT Erna Djuliawati telah disosialisasikan mulai level pemegang izin dan kepada masyarakat setempat. Terdapat bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi berupa dokumen Berita Acara pelaksanaan kegiatan, materi sosialisasi, daftar hadir dan foto dokumentasi kegiatan.
Verifier 1.2.3. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHL	Sedang	Implementasi PHL sebagian sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Implementasi yang belum sesuai antara lain adalah realisasi penanaman blok RKT 2019 belum sesuai dengan target yang telah disusun (realisasi 86,38%), serta rata-rata realisasi penebangan tahun 2019 belum sesuai dengan rencana yang telah disusun (teralisasi luas sebesar 97,29% dari rencana dan teralisasi volume sebesar 85,51% dari rencana).
<b>Indikator 1.3.</b> <b>Jumlah dan kecukupan tenaga profesional bidang kehutanan pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan.</b>	<b>BAIK</b>	
Verifier 1.3.1. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku	Baik	Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan di lapangan tersedia pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku. PT Erna Djuliawati sudah memenuhi kewajiban mempekerjakan tenaga teknis kehutanan sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.70/Menlhk/Setjen/ Kum.1/10/2019 tanggal 17 Oktober 2019 Tentang Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan Pada Hutan Produksi. Dari segi pemenuhan jenis kualifikasinya sudah memenuhi yaitu Bidang Perencanaan Hutan (Ganis PHPL KURPET dan Ganis PHPL CANHUT), Bidang Pemanfaatan Hasil Hutan (Ganis PHPL NENHUT dan Ganis PHPL PKB-R), Bidang Pembinaan Hutan (Ganis PHPL BINHUT), dan Bidang Pengolahan Hasil Hutan (Ganis PHPL PKL) dengan jumlah sebanyak 47 orang.
Verifier 1.3.2. Peningkatan kompetensi SDM	Baik	Realisasi peningkatan kompetensi SDM PT Erna Djuliawati pada periode Tahun 2019 adalah 100 % dari rencana yang telah disusun sesuai kebutuhan, yaitu realisasi

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		sebanyak 102 peserta dari rencana 102 peserta.
Verifier 1.3.3. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan	Baik	Dokumen ketenagakerjaan PT Erna Djuliawati tersedia lengkap, termasuk Laporan Bulanan Tenaga Kerja, Dokumen Wajib Lapor Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (2) UU No.7 tahun 1981, serta Perjanjian Kerja Bersama Antara PT Erna Djuliawati Dengan Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja Kahut Indonesia (PUK SP Kahut Indonesia KSPSI) Periode Tahun 2018 s/d 2020 dan Periode Tahun 2020 s/d 2022.
<b>Indikator 1.4. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK-HA</b>	<b>BAIK</b>	
Verifier 1.4.1 Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL	Baik	Tersedia struktur organisasi dan job description yang memadai, telah disahkan oleh Direksi dan sesuai dengan kerangka PHPL (telah memperhatikan aspek-aspek pengelolaan hutan lestari yaitu aspek produksi, ekologi, dan aspek sosial).
Verifier 1.4.2 Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana	Baik	PT Erna Djuliawati telah memiliki Perangkat SIM dan tersedia tenaga pelaksana. Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan On-Line (SIPUHH On-Line) dan Sistem Informasi Manajemen PNBP telah diterapkan dengan baik. PT Erna Djuliawati telah menerapkan E-Monev kinerja HA melalui Aplikasi berbasis WEB dengan alamat <a href="http://monevkinerjapha.menlhk.go.id">http://monevkinerjapha.menlhk.go.id</a> . sesuai ketentuan yang berlaku Perdirjen PHPL No. P.10/PHPL/UHP/PHPL.1/3/ 2016 tanggal 28 Maret 2016.
Verifier 1.4.3 Keberadaan SPI <i>internal auditor</i> dan efektifitasnya	Baik	PT Erna Djuliawati telah memiliki organisasi SPI/ <i>internal auditor</i> , dan berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan, karena telah menjangkau bidang perencanaan, bidang produksi, bidang sosial dan bidang lingkungan.
Verifier 1.4.4 Keterlaksanaan tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi	Baik	Terdapat keterlaksanaan seluruh tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi. Hasil pengawasan oleh tim SPI tahun 2019 dan 2020 terdapat jenis-jenis temuan yang menjadi dasar tindakan perbaikan berbasis Monev. dituangkan dalam tabel rekomendasi. Dari masing-masing bukti tindakan perbaikan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		oleh manajemen berbasis monev dapat disimpulkan tingkat keterlaksanaan telah mencakup seluruh rekomendasi.
<b>Indikator 1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)</b>	<b>BAIK</b>	
Verifier 1.5.1. Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya	Baik	Kegiatan RKT 2020 yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah mendapatkan persetujuan atas dasar informasi awal yang memadai. Sebelum kegiatan operasional RKT 2020 dilaksanakan, PT Erna Djuliawati melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat sekitar. Tindak lanjut setelah kegiatan sosialisasi adalah adanya kesepakatan/ persetujuan dari masyarakat terhadap rencana kegiatan operasional RKT 2020, ditandai dengan adanya Surat Kesepakatan Bersama yang ditandatangani oleh Kepala Desa sebagai perwakilan masyarakat, dilanjutkan dengan acara kegiatan Selamatan/ Syukuran Pembukaan RKT 2020.
Verifier 1.5.2. Persetujuan dalam proses tata batas	Baik	Terdapat bukti persetujuan dalam proses tata batas areal kerja IUPHHK PT Erna Djuliawati dari para pihak. Realisasi tata batas areal kerja IUPHHK PT Erna Djuliawati telah mencapai 100% (tata batas sudah temu gelang) dan telah ditetapkan secara definitif (Penguahan) berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 59/Kpts-II/93 tanggal 11 Pebruari 1993 dan Keputusan Menteri Kehutanan No. 3173/Kpts/VII-KP/2003 tanggal 4 Juli 2003. Para pihak terkait dengan pelaksanaan tata batas telah menandatangani Berita Acara pelaksanaan tata batas areal kerja IUPHHK PT Erna Djuliawati.
Verifier 1.5.3. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD	Baik	Program CSR/CD (PMDH) PT Erna Djuliawati tahun 2019 dan tahun 2020 ditujukan kepada 15 desa binaan. Dari sisi persetujuan proses pembuatan program PMDH tahun 2020 diperoleh bukti adanya persetujuan dari para pihak (Desa Binaan) dari 15 Desa Binaan (persetujuan 15/15=100%). Dari sisi pelaksanaan terdapat persetujuan terhadap realisasi Program PMDH tahun 2019 dari 15 Desa Binaan (persetujuan 15/15=100%) dengan bukti berupa Berita Acara serah terima, sehingga rata-rata persetujuan dalam proses

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		penetapan program PMDH dan pelaksanaannya mencapai (200/200=100%).
Verifier 1.5.4. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung	Baik	Terdapat persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung dari para pihak. PT Erna Djuliawati telah menetapkan lokasi-lokasi kawasan lindung pada areal kerja sesuai dengan dokumen AMDAL dan dituangkan pada dokumen RKUPHHK Periode 2011-2020 yang telah mendapat persetujuan dari instansi berwenang. Prosentase persetujuan para pihak sudah mencapai 27/27=100 % terdiri dari SK Persetujuan AMDAL, SK Persetujuan RKU dan BA Sosialisasi Kawasan Lindung dari 25 warga desa di dalam dan di sekitar areal kerja.

2. Produksi		
<b>Indikator 2.1.</b> <b>Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.</b>	Baik	
Verifier 2.1.1. Keberadaan dokumen rencana jangka panjang ( <i>management plan</i> ) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.	Baik	PT Erna Djuliawati telah memiliki dokumen rencana jangka panjang berupa dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB periode 2011 s/d 2020 beserta peta lampiran skala 1 : 100.000 yang telah disahkan dan disetujui oleh instansi yang berwenang sesuai surat Keputusan No. 169/VI-BUHA/2011 tanggal 9 Desember 2011 . Dan dokumen Revisi RKUPHHK-HA berbasis IHMB periode 2011-2020 berdasarkan surat Keputusan No. 4000/MenLHK-PHPL/UHP/HPL1/6/2018 tanggal 21 Juni 2018 dan tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKU. PT Erna Djuliawati juga telah mempunyai dokumen RKUPHHK-HA periode 2021-2030 yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan dengan Nomor SK 808/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/2/2020 tanggal 24 Februari 2020
Verifier 2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	Sedang	PT Erna Duliawati telah melakukan penataan areal kerja RKT 2019 dengan tingkat kesesuaiannya petak terhadap RKUPHHK sebesar 100 % dan kesesuaian luas kompartemen A sebesar 100% dan kompartemen B sebesar 99,93%, untuk RKT 2020 kesesuaian petak kompartemen A sebesar 96,15% dan kompartemen B

		sebesar 96,97% dan kesesuaian luas kompartemen A sebesar 88,69% dan kompartemen B sebesar 81,52%
Verifier 2.1.3. Pemeliharaan batas blok dan petak/ kompartemen kerja.	Baik	PT Erna Djuliawati telah melakukan penandaan batas blok dan petak kerja di lapangan pada RKT 2019 dan RKT 2020, tanda batas di lapangan seluruhnya terlihat jelas di lapangan dan sesuai dengan peta RKT 2019 dan 2020
<b>Indikator 2.2.</b> <b>Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem</b>	<b>Baik</b>	
Verifier 2.2.1. Terdapat data potensi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/ Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan)	Baik	PT Erna Djuliawati sudah memiliki data potensi tegakan berdasarkan hasil IHMB tahun 2010 dilengkapi peta pendukung, dan terdapat hasil ITSP tahun 2018, 2019 dan 2020 yang dilengkapi dengan peta pendukung berupa peta pohon skala 1 :1.000
Verifeir. 2.2.2. Terdapat informasi tentang riap tegakan	Baik	PT Erna Djuliawati telah memiliki data pengukuran riap tegakan /PUP pada areal bekas blok tebangan pada areal blok TPTI, TPTI-I dan TPTJ dan telah melakukan analisis berupa riap diameter (cm/th) dan tinggi (m/th) dan Volume (m <sup>3</sup> /ha/th). Berdasarkan hasil perhitungan PUP TPTII dan TPTJ tegakan tinggal (jalur antara) rerata riap volume yang dihasilkan yaitu sebesar 2,33 m <sup>3</sup> /ha/th, dan rerata untuk diameter adalah 0,52 cm/th
Verifier 2.2.3. Terdapat perhitungan internal/self JTT berbasis data potens/hasil inventarisasi dan kondisi kemampuan pertumbuhan tegakan.	Sedang	PT. Erna Djuliawati sudah melakukan analisis data potensi dan riap untuk diameter dan volume tegakan dan Berdasarkan hasil perhitungan PUP TPTII dan TPTJ tegakan tinggal (jalur antara) rerata riap volume yang dihasilkan yaitu sebesar 2,33 m <sup>3</sup> /ha/th, dan rerata untuk diameter adalah 0,52 cm/th, tetapi belum memanfaatkan hasil perhitungan riap untuk menyusun perhitungan JTT sendiri dan PT Erna Djuliawati telah menyampaikan laporan ke puslitbang Bogor
<b>Indikator 2.3.</b> <b>Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan</b>	<b>Baik</b>	
Verifier 2.3.1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Baik	PT. Erna Djuliawati sudah membuat dan dapat menunjukkan ketersediaan SOP untuk seluruh tahapan sistem silvikultur TPTJ yang lengkap dan isinya sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku yaitu Permenhut P11/menhut-II/2009
Verifier 2.3.2.	Baik	PT Erna Djuliawati telah

Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silviculture		mengimplementasikan seluruh SOP sistem silviculture sesuai dengan tahapan sistem silviculture TPTJ dan dapat menunjukkan lokasi untuk setiap aktivitas lapangan
Verifier 2.3.3. Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang.	Baik	PT Erna Djuliawati mempunyai pohon inti dan pohon yang disisakan (tidak ditebang) dari jenis-jenis komersial yang tersebar merata dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-2 sebanyak 34 batang/ha dan hasil uji petik sebanyak 75 pohon/ha (Blok RKT 2019) dan 75 pohon /ha (Blok RKT 2020)
Verifier 2.3.4. Tingkat kecukupan potensi permudaan	Baik	PT Erna Djuliawati mempunyai mempunyai pohon induk jenis komersial yang menjamin ketersediaan permudaan tingkat tiang dari jenis-jenis komersial yang tersebar merata dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-3 dengan nilai anakan tiang berjumlah 275,8 batang /ha (LOA) dan berdasarkan uji petik secara remote audit sebesar 433 btg/ha (Blok RKT 2019) dan 500 btg/ha(Blok RKT 2020)
<b>Indikator 2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hasil hutan kayu.</b>	<b>Baik</b>	
Verifier 2.4.1. Ketersediaan prosedur pemanfaatan/ pengelolaan hutan ramah lingkungan	Baik	PT Erna Djuliawati telah membuat dan dapat menunjukkan SOP pemanfaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan untuk seluruh kegiatan pengelolaan hutan dan isinya sesuai dengan karakteristik kondisi setempat
Verifier 2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan	Baik	PT Erna Djuliawati telah menerapkan penebangan teknologi ramah lingkungan pada seluruh tahapan SOP yang telah dibuat dan dalam pelaksanaannya sudah mengacu kepada SOP RIL masing-masing kegiatan
Verifier 2.4.3. Tingkat kerusakan tegakan tinggal minimal dan keterbukaan wilayah	Sedang	Tingkat kerusakan tegakan tinggal rata-rata untuk semua tingkatan permudaan (semai, pancang, tiang, pohon) untuk PT Erna Djuliawati berdasarkan dokumen kajian sebesar 19,3 %. Berdasarkan uji petik tim lapangan secara remote auditi kerusakan tinggal rata-rata sebesar 17,32 %
Verifier 2.4.4. Limbah pemanfaatan hutan minimal	Baik	Faktor Eksploitasi kegiatan pemanenan kayu di areal PT Erna Djuliawati sebesar 0,83
<b>Indikator 2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya</b>	<b>Baik</b>	
Verifier 2.5.1. Keberadaan dokumen rencana kerja jangka	Sedang	Terdapat dokumen RKT lebih dari 50% yang disusun berdasarkan RKU periode 2011-

pendek (RKT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, <i>self approval</i> ).		2020 dan telah disahkan secara <i>self approval</i>
Verifier 2.5.2. Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang.	Sedang	PT Erna Djuliawati telah membuat peta kerja RKT Tahun 2019 dan 2020 yang menggambarkan blok RKT dan kawasan lindung dan belum seluruhnya sesuai dengan peta RKUPHHK periode 2011-2020
Verifier 2.5.3. Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/ <i>buffer zone</i> / pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan).	Baik	PT Erna Djuliawati telah mengimplementasikan peta kerja RKT 2019 dan 2020 berupa penandaan pada seluruh batas blok dan petak tebangan beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung berupa sempadan sungai/ASDG/Kantong satwa dan hutan lindung dan terlihat jelas di lapangan
Verifier 2.5.4. Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek.	Baik	Realisasi volume tebangan total RKT 2019 sebesar 85,51% dan perkelompok jenis rata-rata 75,37 % dari rencana tebangan tahunan pada lokasi yang sesuai dengan RKT yang disahkan serta tidak melebihi luas yang direncanakan yaitu seluas 5.571 ha dari target 5.728 ha atau 97% dan RKT 2020 realisasi sampai Bulan Agustus 2020 realisasi volume tebangan total mencapai 54,95% dan Rata-rata perkelompok jenis adalah sebesar 37,91%
<b>Indikator 2.6. Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia</b>	<b>Baik</b>	
Verifier 2.6.1. Kondisi kesehatan finansial	Sedang	Kondisi kesehatan finansial perusahaan PT Erna Djuliawati cukup sehat dengan Likuiditas 278,77% , Solvabilitas 100%, Rentabilitas positif dengan opini terhadap laporan keuangan adalah Waja
Verifier 2.6.2. Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	Baik	Realisasi alokasi dana untuk kegiatan pengelolaan hutan di PT Erna Djuliawati pada tahun 2019 >80% yaitu sebesar 101,46 %
Verifier 2.6.3.	Baik	Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan

Realisasi alokasi dana yang proporsional		diberikan secara proporsional perbedaan sebesar 8,38%
Verifier 2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar	Baik	PT Erna Djuliawati telah merealisasikan pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan berjalan lancar dan sesuai dengan tata waktu
Verifier 2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan	Baik	Berdasarkan laporan keuangan, realisasi modal yang ditanamkan kembali ke dalam hutan untuk kegiatan pembinaan hutan secara keseluruhannya mencapai 99,91 % dari yang direncanakan
Verifier 2.6.6. Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan	Baik	PT Erna Djuliawati telah merealisasikan kegiatan pembinaan hutan adalah 99,60% dan kualitas tumbuh yang sehat berdasarkan uji petik adalah 92,21% dan kualitas hidup berdasarkan data pemeliharaan adalah 89,25 %
<b>3. Ekologi</b>		
<b>Indikator 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan</b>	<b>Baik</b>	
Verifier 3.1.1. Luasan kawasan dilindungi	Baik	PT Erna Djuliawati telah mengalokasikan dan menetapkan sebagian areal yang dikelolanya seluas 15.951 Ha dari luas areal kerjanya sebagai kawasan dilindung sesuai dengan RKUPHHK-HA PT Erna Djuliawati Berbasis IHMB periode tahun 2011 – 2020 yang telah disahkan dan disetujui melalui Surat Keputusan Menhut No. SK.169/VI-BUHA/2011 tanggal 9 Desember 2011 dan SK Direktur yang terdiri atas Lereng > 40%, Buffer Zone Hutan Lindung, Kantong Satwa, Situs Budaya, Sempadan sungai, KPPN, Sempadan Mata air. Dan telah disesuaikan sesuai dokumen Revisi RKUPHHK-HA PT Erna Djuliawati periode 2011 – 2020 yang telah disahkan melalui KepMenLHK Nomor : SK.4000/MenLHK – PHPL/UHP/HPL1/2018, tanggal 21 Juni 2018, yaitu penambahan kawasan lindung sumber mata air HL Bukit Beruang seluas 175 Ha. Kondisi biofisik, baik fungsi, jenis dan tata letak kawasan lindung yang ada telah sesuai dengan dokumen perencanaan
Verifier 3.1.2. Penataan kawasan dilindungi (persentase)	Baik	PT Erna Djuliawati telah melakukan penataan kawasan lindung yang telah

yang telah ditandai, tanda batas dikenali).		dialokasikan sesuai dokumen Revisi RKUPHHK-HA Tahun 2018, realiasi penandaan batas kawasan lindung sepanjang 474,81 Km dari target tahun 2019 yaitu 474,81 Km atau 100 %.
Verifier 3.1.3. Kondisi penutupan kawasan dilindungi	Baik	Berdasarkan hasil overlay Citra Landsat PT Erna Djuliawati, Citra Landsat PT Erna Djuliawati, Citra Landsat 8 OLI Band 653 Landsat 7 ETM + Band 542 Path 120 Row 61 Liputan tgl 30 Januari 2019 dan 13 September 2019, kawasan lindung yang masih berhutan seluas 15.951 Ha.
Verifier 3.1.4. Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi	Baik	PT Erna Djuliawati telah melakukan upaya sosialisasi untuk mendapatkan pengakuan terhadap kawasan lindung, hal ini dituangkan dalam dokumen Berita Acara Pelaksanaan Penyuluhan, sasaran kegiatan ini adalah anak sekolah dan masyarakat, capaian pada tahun 2019 dari 14 desa binaan terealisasi sebanyak 15 Desa Binaan plus 1 Desa terdampak dan sebanyak 17 Sekolah SD dan SMP.
Verifier 3.1.5. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKU.	Baik	PT Erna djuliawati telah melaksanakan pengelolaan kawasan ,lindung berdasarkan dokumen perencanaan, RKL/RPL dan peraturan yang berlaku, yang dituangkan dalam laporan Rencana Kerja Tahunan, Laporan RKL-RPL Semester II tahun 2019 dan semester I tahun 2020 dan Laporan Implementasi, Identifikasi, Pengelolaan, Monitoring Areal HCVF IUPHHK PT Erna Djuliawati Pada Kawasan Lindung Konervasi dan Situs Budaya Tahun 2018
<b>Indikator 3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan</b>	<b>Baik</b>	
Verifier 3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada	Baik	PT Erna Djuliawati memiliki Prosedur terkait Perlindungan Hutan, prosedur mencakup jenis-jenis gangguan seperti gangguan hutan, penanggulangan kebakaran, perladangan, pemanfaatan HHBK, Perburuan, penebangan tanpa izin dan hama penyakit tanaman.Prosedur telah mengacu peraturan yang berlaku
Verifier 3.2.2. Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan	Sedang	Sarana Prasarana pengamanan hutan tersedia dengan baik dan seusai ketentuan, untuk sapras perlindungan

		<p>hutan bidang kebakaran yang tersedia sebanyak 45 Jenis atau 100 % dari seharusnya sebanyak 45 Jenis, secara jumlah terpenuhi sebanyak 1052 pcs dari 1083 pcs atau 97,14 %, hal ini secara jumlah belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam PerMENLHK No. P. 32 Tahun 2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. PT Erna Mempunyai Komitmen pemenuhan dengan menunjukkan Alokasi Budget Tahun 2020 dalam pengadaan peralatan DAMKAR</p>
<p>Verifier 3.2.3. SDM perlindungan hutan</p>	Sedang	<p>PT Erna Djuliawati telah memiliki personil Satuan Pengamanan Hutan sebanyak 36 orang dengan personil yang berkualifikasi SATPAM sebanyak 32 Orang dan 4 orang belum mengikuti DIKSAR SATPAM. sedangkan personil Brigade Pengendalian kebakaran hutan dan lahan sebanyak 45 orang, sebanyak 30 orang berkualifikasi Personel Bidang Pengendalian Kebakaran Hutan sedangkan 15 orang belum berkualifikasi, tahun 2020 PT Erna Djuliawati Mengajukan pelatihan dasara DALKARHUTLA kepada Balai PPIKHL, namun tertunda pelaksanaan diakibatkan pandemic COVID 19</p>
<p>Verifier 3.2.4. Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)</p>	Baik	<p>PT Erna Djuliawati telah melakukan upaya upaya perlindungan gangguan hutan yang mencakup seluruh jenis gangguan dan tindakan yang sesuai dengan kondisi gangguan.</p>
<p><b>Indikator 3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan</b></p>	<b>Baik</b>	
<p>Verifier 3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah &amp; air</p>	Baik	<p>PT Erna Djuliawati telah memiliki prosedur terkait pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang mencakup pengelolaan seluruh dampak terhadap tanah dan air. Prosedur perlu diperbarui dalam hal acuan peraturan pengelolaan Limbah B3 yang terbaru</p>
<p>Verifier 3.3.2. Sarana pengelolaan dan pemantauan</p>	Baik	<p>Sarana dan Prasarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan</p>

dampak terhadap tanah dan air		air yang tersedia di PT Erna Djuliawati sesuai hasil verifikasi dokumen dan lapangan, menunjukkan keberadaan dan fungsinya bekerja dengan baik dan jenisnya telah sesuai dengan ketentuan (dokumen AMDAL dan Peraturan yang berlaku) dan peruntukannya
Verifier 3.3.3. SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Baik	PT Erna Djuliawati telah memiliki SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air dengan jumlah kualifikasi yang sesuai, yaitu tersedia sebanyak 13 GANIS PHPL-BINHUT, dari seharusnya 8 orang (PERDIRJEN PHPL No. P.16/PHPL-IPHH/2015)
Verifier 3.3.4. Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif	Baik	PT Erna Djuliawati telah memiliki dokumen perencanaan pengelolaan berupa Rencana Kelola Lingkungan AMDAL tahun 1997 dan dokumen Revisi RKUPHHK-HA 2018, yang dalam pelaksanaannya diturunkan dan prosedur kerja. Implementasi kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air telah dilaksanakan sesuai dokumen perencanaan dan peraturan yang berlaku yang dituangkan dalam laporan pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan dan dilaporkan setiap semester kepada Dinas Kehutanan Provinsi Kalteng, Dinas lingkungan Hidup Prov. Kalteng dan Dinas Lingkungan Hidup Kab Seruyan, serta KLHK.
Verifier 3.3.5. Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Baik	PT Erna Djuliawati telah memiliki dokumen perencanaan pemantauan berupa Rencana Pemantauan Lingkungan AMDAL tahun 1997 dan dokumen Revisi RKUPHHK-HA 2018, yang dalam pelaksanaannya diturunkan dan prosedur kerja. Implementasi kegiatan pemantauan dampak terhadap tanah dan air telah dilaksanakan sesuai dokumen perencanaan dan peraturan yang berlaku yang dituangkan dalam laporan pelaksanaan Pemantauan Lingkungan dan dilaporkan setiap semester kepada Dinas Kehutanan Provinsi Kalteng, Dinas lingkungan Hidup Prov. Kalteng dan Dinas Lingkungan Hidup Kab Seruyan, serta KLHK

<p>Verifier 3.3.6. Dampak terhadap tanah dan air.</p>	<p>Sedang</p>	<p>Dalam Operasional kehutanan PT Erna Djuliawati terdapat indikasi dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air, namun besarnya masih sesuai dengan baku mutu yang dipersyaratkan dalam peraturan yang berlaku, hal ini dikarenakan PT Erna Djuliawati melakukan upaya pengelolaan dampak sesuai dokumen RKL-RPL, RKUPHHK-HA dan Ketentuan/peraturan yang berlaku.</p>
<p><b>Indikator 3.4.</b> <b>Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik</b></p>	<p>Baik</p>	
<p>Verifier 3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/ peraturan yang berlaku.</p>	<p>Baik</p>	<p>PT Erna Djuliawati telah memiliki prosedur terkait identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin dan telah sesuai dengan peraturan terbaru tentang jenis tumbuhan dan satwa dilindungi yaitu PerMenLHK no P. 106 /MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MenLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa dilindungi peraturan yang berlaku.</p>
<p>Verifier 3.4.2. Implementasi kegiatan identifikasi.</p>	<p>Baik</p>	<p>PT Erna Djuliawati telah melaksanakan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang berdasarkan ketentuan /peraturan yang berlaku dan mencakup seluruh kelompok jenis flora dan fauna.</p>
<p><b>Indikator 3.5.</b> <b>Pengelolaan flora untuk :</b> <b>a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak;</b> <b>b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik</b></p>	<p>Sedang</p>	
<p>Verifier 3.5.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan</p>	<p>Baik</p>	<p>PT Erna Djuliawati memiliki prosedur pengelolaan flora, Prosedur mencakup spesies dilindungi dan/atau langka</p>

perundangan yang berlaku.		( <i>endangered</i> ), jarang ( <i>rare</i> ), terancam punah ( <i>threatened</i> ) dan endemik yang ada di areal kerja
Verifier 3.5.2. Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan	Sedang	Pengelolaan terhadap flora yang jarang, langka, dan terancam punah, serta endemik yang dilaksanakan belum mencakup seluruh jenis hasil identifikasi, sedangkan tahapan pengelolaan baru kegiatan identifikasi, inventarisasi dan pemantauan, sedangkan pengelolaan dalam bentuk pembinaan habitat dan populasi, penyelamatan jenis, pengkajian, penelitian dan pengembangbiakan belum dilakukan
Verifier 3.5.3. Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Sedang	Masih terdapat potensi gangguan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin akibat dari kegiatan operasional kehutanan sendiri, gangguan perambahan lahan, penebangan tanpa izin dan perburuan serta kebakaran hutan yang terjadi pada beberapa lokasi.
<b>Indikator 3.6.</b> <b>Pengelolaan fauna untuk :</b> <b>a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak;</b> <b>b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik</b>	<b>Sedang</b>	
Verifier 3.6.1. Ketersedian prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan).	Baik	PT Erna Djuliawati memiliki prosedur pengelolaan fauna, Prosedur mencakup spesies dilindungi dan/atau langka ( <i>endangered</i> ), jarang ( <i>rare</i> ), terancam punah ( <i>threatened</i> ) dan endemik yang ada di areal kerja
Verifier 3.6.2. Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan.	Sedang	Pengelolaan terhadap fauna yang jarang, langka, dan terancam punah, serta endemik yang dilaksanakan belum mencakup seluruh jenis hasil identifikasi, pengelolaan secara menyeluruh diprioritaskan pada spesies kunci antara lain orang utan, sedangkan tahapan pengelolaan baru kegiatan identifikasi, inventarisasi dan pemantauan, sedangkan pengelolaan dalam bentuk

		pembinaan habitat dan populasi, penyelamatan jenis, pengkajian, penelitian dan pengembangbiakan belum dilakukan. Kegiatan pengkajian telah dilakukan untuk spesies kunci, untuk jenis dilindungi lainnya belum terlaksana.
<p>Verifier 3.6.3. Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.</p>	Sedang	Masih terdapat potensi gangguan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin akibat dari kegiatan operasional kehutanan sendiri, gangguan perambahan lahan, penebangan tanpa izin dan perburuan.
<b>4. Sosial</b>		
<p><b>Indikator 4.1.</b> <b>Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat</b></p>	Baik	
<p>Verifier 4.1.1 Ketersediaan dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin</p>	Baik	PT Erna Djuliawati telah memiliki dokumen yang lengkap terkait pola penguasaan dan pemanfaatan SDH, identifikasi dasar masyarakat dan rencana pemanfaatan SDH berupa, Revisi RKT periode 2011-2020, Revisi RKT tahun 2019 dan 2020, Rencana Operasioanal PMDH 2019 dan 2020, Monitoring HHNK, Pemukiman dan Garapan Masyarakat (PGM), perladangan masyarakat, Kawasan Situs budaya dan Hutan Adat, dan lainnya
<p>Verifier 4.1.2 Tersedia mekanisme pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan secara parsitipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan.</p>	Baik	PT Erna Djuliawati telah memiliki mekanisme penataan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif & konflik batas kawasan berupa SOP Pembuatan Tata Batas Pemukiman dan Garapan Masyarakat PT Erna Djuliawati (EDL/SOP/4.1), SOP Penanganan Konflik PT Erna Djuliawati (EDL/SOP/4.7) dan lainnya. Mekanisme tersebut telah diimplementasikan dan disepakati para pihak
<p>Verifier 4.1.3 Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH</p>	Baik	PT Erna Djuliawati memiliki mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH seperti SOP Aktivitas Masyarakat dalam

		Areal Konsesi (EDL/SOP/4.4), SOP Pemanfaatan HHBK oleh Masyarakat (EDL/SOP/4.13), SOP Bantuan Untuk Masyarakat (EDL/SOP/4.17) dan lainnya. Mekanisme berupa SOP tersebut lengkap, legal dan jelas
<p>Verifier 4.1.4</p> <p>Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/ areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat.</p>	Baik	PT Erna Djuliawati memiliki bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan dengan batas kawasan yang dimiliki masyarakat berupa batas Pemukiman dan Garapan Masyarakat, dan Batas Konsesi yang telah temu gelang
<p>Verifier 4.1.5</p> <p>Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/ KPH</p>	Baik	Terdapat persetujuan para pihak terhadap luas dan batas PT Erna Djuliawati berupa SK Pengukuhan temu gelang, SK Pengukuhan Batas PGM, Batas partisipatif PGM yang disetujui masyarakat. Masih ada konflik berupa perladangan berpindah/rotasi yang dapat dikelola dengan baik
<p><b>Indikator 4.2.</b></p> <p><b>Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku</b></p>	<b>Baik</b>	
<p>Verifier 4.2.1</p> <p>Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/ berlaku.</p>	Baik	PT Erna Djuliawati memiliki dokumen menyangkut tanggung jawab sosial sesuai dengan perundangan, seperti Revisi RKUPHHK 2011-2020, Revisi RKTUPHHK tahun 2019 dan Tahun 2020, Rencana Operasional PMDH tahun 2019 dan 2020, Laporan Bulanan PMDH, Laporan dampak sosial dan lainnya
<p>Verifier 4.2.2</p> <p>Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat</p>	Baik	PT Erna Djuliawati memiliki dokumen mekanisme pemenuhan kewajiban sosial yang lengkap dan legal dalam bentuk SOP, seperti SOP Penerimaan HHBK dari Masyarakat (EDL/SOP/4.14), Penyuluhan Perladangan Berpindah (EDL/SOP/4.10), Kegiatan Kredit Usaha Tani Ayam Potong (EDL/SOP/4.19), Kegiatan Kredit Usaha Tani Sayur (EDL/SOP/4.25).
<p>Verifier 4.2.3</p> <p>Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola</p>	Baik	PT Erna Djuliawati telah melaksanakan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban perusahaan terhadap

SDH		masyarakat dalam mengelola SDH, seperti: sosialisasi Visi Misi, sosialisasi RKT, sosialisasi PGM, sosialisasi perladangan, sosialisasi Kawasan Lindung, dan sosialisasi PMDH (bersamaan dengan sosialisasi RKT). Bukti kegiatannya berupa BAP, Daftar Hadir, Photo, surat tugas/jalan
<b>Verifier 4.2.4</b> Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/ implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH.	Baik	PT Erna Djuliawati telah merealisasikan pemenuhan tanggung jawab sosial kepada seluruh desa-desa binaan seperti akses HHNK, program PMDH yang sudah terealisasi di tahun 2019 mencapai lebih dari 100% dari rencana dan tahun 2020 (Agustus) sudah mencapai 71%. Bukti-bukti realisasi tersedia lengkap dan terdokumentasi dengan baik
<b>Verifier 4.2.5</b> Ketersediaan laporan/ dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi.	Baik	Terdapat laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial PT Erna Djuliawati terhadap masyarakat secara lengkap seperti, Laporan bulanan PMDH, Laporan Monitoring HHNK, Berita acara ganti rugi tanam tumbuh, berita acara bantuan dan lainnya
<b>Indikator 4.3.</b> <b>Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak</b>	Baik	
<b>Verifier 4.3.1</b> Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH	Baik	PT Erna Djuliawati memiliki data dan informasi yang lengkap mengenai masyarakat hukum adat dan/atau setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH, seperti data karyawan lokal, pemanfaatan HHBK dan lainnya
<b>Verifier 4.3.2</b> Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Baik	Terdapat mekanisme yang legal, lengkap dan jelas mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat berupa dokumen Standar Operating Procedure, seperti Penyuluhan Pemanfaatan Pemukiman dan Garapan Masyarakat

		(EDL/SOP/4.8), Bantuan Masyarakat (EDL/SOP/4.17), Kegiatan Kredit Usaha Tani Sayur (EDL/SOP/4.25) dan lainnya
Verifier 4.3.3 Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat	Baik	PT Erna Djuliawati memiliki lengkap dokumen rencana mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat secara lengkap dan jelas. Rencana tersebut dimuat di Revisi RKUPHHK periode 2011-2020, Revisi RKTUPHHK tahun 2019 dan 2020, dokumen rencana operasional tahun 2019 dan tahun 2020, dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran tahun 2019 dan tahun 2020 dan lainnya
Verifier 4.3.4 Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran	Baik	Terdapat bukti implementasi peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat oleh PT Erna Djuliawati, berupa peran serta sebagai pekerja lokal, realisasi kegiatan PMDH tahun 2019 dan tahun 2020. Total Implementasi mencapai 85,16 %
Verifier 4.3.5 Keberadaan dokumen/ laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak	Baik	PT Erna Djuliawati memiliki dokumen/laporan lengkap mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak. Dokumen-dokumen tersebut terdokumentasi dengan baik. Seperti dokumen laporan bulanan PMDH tahun 2019 dan Agustus 2020, Monitoring HHNK, pemasaran hasil bumi, laporan penerimaan KUT Ayam, Sayur dan Ikan, pembayaran PSDH, PPH 21, BPJS dan lainnya.
<b>Indikator 4.4.</b> <b>Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal</b>	<b>Baik</b>	
Verifier 4.4.1 Tersedianya mekanisme resolusi konflik	Baik	PT Erna Djuliawati memiliki mekanisme resolusi konflik seperti SOP Pencegahan Permasalahan PT Erna Djuliawati (EDL/SOP/4.6), SOP Penanganan Konflik PT Erna Djuliawati (EDL/SOP/4.7). Selain itu SOP telah mengacu pada Perdirjen PHPL Nomor P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016.
Verifier 4.4.2	Baik	PT Erna Djuliawati telah memiliki Laporan

Tersedia peta konflik		Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik yang mengacu Perdirjen P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 bahwa Tahun 2019 dan tahun 2020 berstatus Rendah (Terkendali), selain itu laporan ini sudah dilaporkan ke Instansi terkait
Verifier 4.4.3 Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak	Baik	PT Erna Djuliawati memiliki organisasi penyelesaian konflik yaitu Susunan Tim Penanganan Kasus Sosial dengan melibatkan para pihak dan disetujui oleh Camat Seruyan Hulu. Selain itu memiliki pendanaan yang cukup untuk mengelola konflik. dengan terselesaikannya konflik yang membutuhkan pendanaan sebagai kompensasi
Verifier 4.4.4 Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi	Baik	PT Erna Djuliawati telah mendokumentasikan dengan baik dan lengkap untuk seluruh dokumen penyelesaian konflik tahun 2019 dan 2020, seperti dokumen pengaduan, laporan security, dokumen laporan pertemuan, hingga Kesepakatan Bersama dilampirkan dengan foto-foto dan peta
<b>Indikator 4.5. Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja</b>	<b>Baik</b>	
Verifier 4.5.1 Adanya hubungan industrial	Baik	Hubungan Industrial pada PT Erna Djuliawati didasarkan pada dokumen Perjanjian kerja Bersama yang sah periode 2020-2022. Seluruh hubungan industrial yang tertera pada dokumen PKB telah direalisasikan pada seluruh karyawan/pekerja seperti tunjangan kesehatan berupa kacamata, tunjangan duka, dan lainnya, tersedia serikat pekerja yang berfungsi dengan baik
Verifier 4.5.2 Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja	Baik	PT Erna Djuliawati memiliki rencana pengembangan kompetensi berupa rencana pelatihan/training internal dan training eksternal. Kegiatan internal training periode Agustus 2019- Agustus 2020 kegiatan terealisasi 100% sedangkan jumlah peserta yang telah teralisasi 94,44% namun untuk training eksternal kegiatan yang terealisasi

		mencapai 56,25% dan peserta mencapai 51,15%.
Verifier 4.5.3 Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya	Baik	PT Erna Djuliawati memiliki dokumen standar jenjang karir yang tertuang pada Dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan SOP mengenai Kegiatan Training/Promosi/Pembinaan Pekerja (EDL-II/10/SOP/PGA-TRAINING). Butir-butir dalam dokumen tersebut telah diimplementasikan seluruhnya seperti tersedianya surat usulan hingga SK pengangkatan
Verifier 4.5.4 Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya	Baik	PT Erna Djuliawati memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan yang tertuang pada dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang sah dan masih berlaku. Seluruh butir-butir pada PKB sudah direalisasikan, seperti gaji diatas UMK, Tunjangan Kacamata, Tunjangan Duka, Tunjangan Kesehatan dan lainnya.
<b>5. Verifikasi Legalitas Kayu</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK</b>	<b>Memenuhi</b>	
Verifier a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).	<b>Memenuhi</b>	Berdasarkan hasil verifikasi pada kegiatan Penilikan ke-3 tidak terdapat perubahan terkait izin yang sah, izin pengelolaan dibuktikan dengan keberadaan, kelengkapan dan keabsahan dokumen SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 15/KPTS-IV/1999 tanggal 18 Januari 1999 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Dengan Sistem Tebang Pilih Dan Tanam Jalur Kepada PT Erna Djuliawati Seluas ± 184.206 ha Di Provinsi Dati I Provinsi Kalimantan Tengah dilengkapi dengan lampiran peta Areal Kerja HPHTI PT ERNA DJULIAWATI (Periode II) skala 1:100.000. Areal kerja PT Erna Djuliawati berdasarkan Peta Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK.529/Menhut-II/2012 tanggal 25 September 2012 skala 1 : 250.000, areal PT

		Erna Djulawati termasuk dalam areal fungsi kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 179.177 Ha, dan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) seluas 5.029 Ha
<p>Verifier b. Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IUPHHK).</p>	<b>Memenuhi</b>	Berdasarkan hasil verifikasi pada kegiatan Penilikan ke-3 diketahui bahwa PT Erna Djulawati telah membayar lunas kewajiban pembayaran luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang telah diterbitkan oleh Departemen Kehutanan dengan luasan areal dan tarif sesuai yang telah ditentukan
<p>Verifier c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).</p>	<b>Memenuhi</b>	Pada areal PT Erna Djulawati terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK, yaitu terdapat menara komunikasi PT Profesional Telekomunikasi Indonesia Nomor: LGL-KAL-CKL-0049-T-B dan Nomor: APJ-6.008/16 tanggal 14 April 2016 dengan luas 400 m2 ditambah akses jalan sebesar 15 m2. Pendirian menara telekomunikasi telah dilengkapi dengan Surat Izin Mendirikan Bangunan dari Bupati Seruyan No. 979.3/161/ KPPT/VI/2014, tanggal 17 Juni 2014. Sampai dengan kegiatan penilikan ke-3 PT Erna Djulawati terus berupaya melakukan pendataan penggunaan kawasan yang sah diluar kegiatan IUPHHK.
<p><b>Indikator 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang</b></p>		
<p>Verifier a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumen RKUPHHK/RPKH &amp; lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL <i>Timber Cruising</i> dan/atau Canhut</li> <li>- Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i></li> <li>- Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut</li> </ul>	<b>Memenuhi</b>	Berdasarkan hasil verifikasi diketahui bahwa PT Erna Djulawati telah memiliki dokumen RKUPHHK-HA berbasis IHMB Periode Tahun 2011-2020, Dokumen Revisi RKUPHHK-HA berbasis IHMB Periode Tahun 2011-2020 yang telah disahkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 4000/MenLHK-PHPL/UHP/HPL1/6/2018 tanggal 21 Juni 2018, dan telah memiliki dokumen RKTUPHHK-HA tahun 2019 dan tahun 2020 yang telah disahkan oleh Direktur Utama secara <i>self approval</i> dilengkapi dengan peta kerja dengan skala 1:100.000 yang telah dibuat oleh GANIS PHPL CANHUT An. Ir. Rian Junjunan dengan No. Reg. 00775-10/CANHUT/XVIII/2019. Selain itu PT Erna Djulawati telah memiliki dokumen RKUPHHK-HA periode 2021-2030 yang telah

		<p>disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SE.808/MenLHK-PHPL/UHP.1/2/2020 tanggal 24 Februari 2020 dilengkapi dengan peta lampiran skala 1:100.000 yang telah dibuat oleh GANIS PHPL CANHUT An. Ir. Rian Junjuna dengan No. Reg. 00775-10/CANHUT/XVIII/2019. Hasil verifikasi diketahui untuk RKTUPHHK-HA tahun 2019 dan tahun 2020 telah sesuai dengan dokumen Revisi RKUPHHK-HA periode 2011-2020. Dengan demikian verifier 2.1.1.a</p>
<p>Verifier b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan</p>	<b>Memenuhi</b>	<p>PT Erna Djuliawati telah memiliki peta terkait dengan areal/kawasan yang tidak boleh ditebang. Hasil verifikasi diketahui areal/Kawasan yang tidak boleh ditebang masuk dalam peta HCVF skala 1:100.000 dan telah ditetapkan dalam SK Direktur Utama untuk masing-masing kawasan tersebut. Hasil rekaman foto dan video pada kegiatan remote audit diketahui, untuk penandaan di lapangan dengan menggunakan cat warna merah, patok dan pemasangan papan nama, untuk lokasi areal tidak boleh ditebang yang terdapat dalam blok RKT 2019 (Sempadan Sungai dan Kantong Satwa) dan RKT 2020 (Sempadan Sungai dan Buffer Zone Hutan Lindung) telah sesuai dengan peta HCVF maupun peta RKT tahun 2019 dan tahun 2020. Implementasi penandaan di lapangan telah sesuai dengan prosedur terkait Penataan Areal Kerja dan Prosedur Pengelolaan Kawasan lindung.</p>
<p>Verifier c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan</p>	<b>Memenuhi</b>	<p>Peta RKTUPHHK-HA Tahun 2019 dan Tahun 2020 telah disahkan oleh Direktur PT Erna Djuliawati secara <i>self approval</i> dan berdasarkan hasil pengecekan koordinat lokasi blok RKTUPHHK-HA tahun 2019 dan 2020 posisi blok tebangan di lapangan sesuai dengan peta rencana blok tebangan pada RKTUPHHK-HA Tahun 2019 dan Tahun 2020, penandaan batas blok dengan menggunakan cat warna kuning pada pohon yang terdapat pada jalur rintisan. Begitu juga untuk pembuatan batas petak dalam blok RKT dapat di buktikan di lapangan dan sesuai dengan peta RKT tahun 2019 dan tahun 2020 dengan penandaan cat warna putih pada jalur rintisan</p>
<p><b>Indikator 2.2.1. Pemegang Izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku</b></p>		

<p>Verifier a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.</p>	<p><b>Memenuhi</b></p>	<p>PT Erna Djuliawati telah mempunyai dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2011 - 2020 yang telah disahkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan SK. 169/VI-BUHA/2011 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Periode Tahun 2011 – 2020 atas nama PT Erna Djuliawati Provinsi Kalimantan Tengah, ditetapkan di Jakarta tanggal 9 Desember 2011. Dilengkapi lampiran Peta RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2011 - 2020 PT Erna Djuliawati Skala 1 : 100.000. PT Erna Djuliawati juga telah mempunyai Revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2011 s.d 2020 PT Erna Djuliawati yang telah disahkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 4000/MenLHK-PHPL/UHP/HPL1/6/2018 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Periode Tahun 2011 – 2020 atas nama PT Erna Djuliawati Provinsi Kalimantan Tengah, ditetapkan di Jakarta tanggal 21 Juni 2018. Dilengkapi lampiran Peta Revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2011 - 2020 PT Erna Djuliawati Skala 1 : 100.000</p>
<p>Verifier b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri</p>	<p><b>tidak dilakukan penilaian (NA).</b></p>	<p>Hasil verifikasi berdasarkan dokumen Ijin dan rencana pemanfaatan kayu (RKUPHHK-HA) PT Erna Djuliawati yang telah disahkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diketahui bahwa, PT Erna Djuliawati dalam menjalankan usahanya untuk memproduksi kayu bulat dari hutan alam dengan menggunakan sistem silvikultur yang Tebang Pilih Tanam Jalur (TPTJ). Bukan menggunakan sistem silvikultur THPB. Dengan demikian Verifier b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri</p>
<p><b>Indikator 3.1.1.</b> <b>Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di-</b> LHP-kan</p>		
<p>Verifier</p>	<p><b>Memenuhi</b></p>	<p>PT Erna Djuliawati telah membuat LHP yang dibuat oleh petugas yang telah ditetapkan</p>

<p>Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.</p>		<p>melalui SK Direktur Utama sebagai Penerbit LHP, dan seluruh LHP telah sesuai dengan buku ukur baik dari jumlah batang dengan volume. Hasil uji petik fisik kayu dengan Dokumen LHP di TPK Hutan Km 96 diketahui tidak terdapat perbedaan jenis dan jumlah batang tetapi terdapat perbedaan ukuran volume sebesar 1,12 %. Sedangkan uji petik fisik kayu di TPK Antara/Logpond Kelakik diketahui tidak terdapat perbedaan jenis dan jumlah batang tetapi terdapat perbedaan ukuran volume sebesar 0,98%, seluruh hasil uji petik masih berada di bawah batas selisih yang diperkenankan oleh peraturan perundangan yang berlaku yaitu kurang dari 5%. Selain itu nomor batang yang terdapat dalam LHP dapat tertelusur sampai ke tunggak di petak tebangan</p>
<p><b>Indikator 3.1.2.</b> <b>Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan</b></p>		
<p>Verifier Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- TPK hutan ke TPK Antara,</li> <li>- TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar,</li> <li>- TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar</li> </ul>	<p><b>Memenuhi</b></p>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi pada kegiatan Penilikan ke-3 diketahui PT Erna Djuliawati telah mengangkut kayu bulat besar, kayu bulat sedang dan kayu bulat kecil dari TPK Hutan ke TPK Antara/Logpond Kelakik dimana seluruh kayu yang diangkut disertai surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHHK) yang diterbitkan oleh petugas yang telah ditetapkan. Hasil uji petik pada dokumen LMKB di TPK Hutan diketahui bahwa pengangkutan kayu bulat telah tercatat dan terkonfirmasi dalam LMKB TPK Hutan pada kolom pengurangan</p>
<p><b>Indikator 3.1.3.</b> <b>Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang IUPHHKHA</b></p>		
<p>Verifier a. Tanda-tanda PUHH/ <i>barcode</i> pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak</p>	<p><b>Memenuhi</b></p>	<p>Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh kayu bulat yang dihasilkan dari Blok RKTUPHHK Tahun 2019 dan Tahun 2020 telah diberi nomor PUHH sesuai ketentuan yaitu dengan (1) Label plastik warna merah yang memuat nomor petak, nomor pohon, jenis dan diameter, (2) pahatan pada bontos yang merupakan kode scaler dan label ID Barcode pada bontos kayu</p>
<p>Verifier b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin</p>	<p><b>Memenuhi</b></p>	<p>PT Erna Djuliawati telah mempunyai sistem yang jelas dalam penomoran kayu bulat hasil produksi yaitu dengan memberi nomor pohon hasil cruising, nomor kode scaler dan label ID Barcode pada bontos dan penomoran</p>

		tersebut diterapkan secara konsisten sesuai dengan prosedur Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan dan Pemasangan <i>ID Barcode</i> Nomor ED/SOP/1.3 Edisi 2020 Revisi 09 berlaku efektif 2 Januari 2020, sehingga dapat menjamin ketelusuran identitas kayunya.
<b>Indikator 3.1.4.</b> <b>Pemegang Izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK</b>		
Verifier Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman.	<b>Memenuhi</b>	PT Erna Djuliawati mampu menunjukkan kelengkapan dan keabsahan arsip SKSHHK dan lampiran-lampirannya berupa Daftar Kayu Bulat dan SKSHHK diterbitkan oleh petugas yang berwenang yang telah ditunjuk oleh perusahaan. Dokumen SKSHHK yang telah di terima di TPK Antara/Logpond telah diperiksa kesesuaian Fisik Kayu dengan daftar kayu bulat dalam dokumen SKSHHK, dan terdapat berita acara pemeriksaan yang dilampiri dengan daftar periksa kayu bulat untuk masing-masing SKSHHK yang telah diterima. selain itu dokumen SKSHHK yang telah diterima di stample TELAH DIGUNAKAN, maka tatacara penerbitan dan penerimaan kayu telah sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tanggal 17 Oktober 2019
<b>Indikator 3.2.1.</b> <b>Pemegang Izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)</b>		
Verifier a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	<b>Memenuhi</b>	Berdasarkan verifikasi dokumen PT Erna Djuliawati telah menunjukkan Dokumen terkait dengan Surat Perintah Pembayaran (SPP) kewajiban pembayaran PSDH/DR, bukti SPP diterbitkan secara online melalui system SIPNBP-SIMPONI. Berdasarkan uji silang antara hasil produksi dalam dokumen LHP dengan tagihan PSDH/DR yang dikeluarkan telah sesuai baik dari segi kelompok jenis, ukuran berdasarkan LHP, jumlah batang dan volume.
Verifier b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	<b>Memenuhi</b>	Berdasarkan hasil verifikasi pada kegiatan Penilikan ke-3 pemeriksaan terhadap dokumen Bukti Setor PSDH, selama periode September 2019 – September 2020 dibuktikan dengan bukti pembayaran dari SIPNBP-SIMPONI, bukti setor berupa slip

		dari Bank BNI Cabang Pontianak dan BAP kegiatan rekonsiliasi triwulan dengan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah. Hasil verifikasi untuk jumlah yang dibayarkan telah sesuai dengan SPP yang diterbitkan pada setiap dokumen LHP, jumlah pembayaran sesuai dengan kelompok jenis kayu menurut SPP dan tarif PSDH dan DR berdasarkan kelompok jenis kayu
<p>Verifier c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.</p>	<b>Memenuhi</b>	<p>PT Erna Djuliawati dalam melakukan pembayaran PSDH dan DR telah sesuai dengan tarif yang telah ditentukan berdasarkan ukuran dan kelompok jenis kayu yang di produksi. Hasil verifikasi untuk tarif yang tertera dalam dokumen SPP PSDH/DR telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor P. 68/Menhut-II/2014 dan Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor P.12 Tahun 2014 tanggal 14 Februari 2014 dan telah menerapkan tarif terbaru sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tanggal 19 Desember 2017</p>
<p><b>Indikator 3.3.1.</b> <b>Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).</b></p>		
<p>Verifier Dokumen PKAPT.</p>	<b>tidak dilakukan penilaian (NA).</b>	PT Erna Djuliawati tidak melakukan perdagangan kayu antar pulau
<p><b>Indikator 3.3.2.</b> <b>Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah</b></p>		
<p>Verifier Dokumen yang menunjukkan identitas kapal</p>	<b>tidak dilakukan penilaian (NA).</b>	PT Erna Djuliawati tidak melakukan perdagangan kayu antar pulau
<p><b>Indikator 3.4.1</b> <b>Implementasi tanda V-Legal</b></p>		
<p>Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan</p>	<b>Memenuhi</b>	PT Erna Djuliawati telah menerapkan penggunaan Logo Tanda V-Legal yang diterapkan pada ID Barcode kayu, dan dokumen angkutan SKSHK. Penggunaan Logo Tanda V-Legal telah sesuai dengan ketentuan dalam Surat Perjanjian Sublisesi

		dengan PT Mutu Agung Lestari Nomor: LPPHPL-006.6/LP&VI-SL/XI/2017/APJ-G.010/17 tanggal 03 November 2017, dengan penempatan tanda V-Legal baik pada produk/kayu dan media lain
<b>Indikator 4.1.1.</b> <b>Pemegang Izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya</b>		
Verifier Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	<b>Memenuhi</b>	PT Erna Djuliawati telah memiliki dokumen AMDAL terdiri dari, Laporan Laporan Utama ANDAL, Rencana Pengelolaan Lingkungan, Rencana Pemantauan Lingkungan yang telah disetujui oleh Kepala Kepala Komisi Pusat AMDAL DEPHUT berdasarkan Keputusan Komisi AMDAL DEPHUT No. 59/DJ-VI/AMDAL/97 tanggal 03 April 1997. Proses penyusunan AMDAL telah melalui serangkaian kegiatan yang sesuai dengan ketentuan
<b>Indikator 4.1.2.</b> <b>Pemegang Izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial</b>		
Verifier a. Dokumen RKL dan RPL	<b>Memenuhi</b>	PT Erna Djuliawati telah memiliki dokumen RKL dan RPL yang merupakan bagian dokumen tidak terpisahkan dari ANDAL yang telah disetujui Kepala Komisi Pusat AMDAL DEPHUT berdasarkan Keputusan Komisi AMDAL DEPHUT No. 59/DJ-VI/AMDAL/97 tanggal 03 April 1997. Dokumen RKL RPL mengacu kepada dokumen ANDAL yang meliputi aspek fisik - kimia, biologi dan sosial ekonomi budaya.
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	<b>Memenuhi</b>	PT Erna Djuliawati telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan, hal ini dibuktikan dengan adanya laporan implementasi RKL dan RPL yang telah disusun dan dilaporkan kepada pihak terkait yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seruyan dan Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Kalimantan Tengah. Implementasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan lapangan diketahui bahwa, PT Erna Djuliawati telah mengimplementasikan kegiatan terkait dampak penting aspek fisik, kimia, biologi dan

		social
<b>Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3</b>		
Verifier a. Pedoman/ prosedur K3	<b>Memenuhi</b>	PT Erna Djuliawati telah mempunyai SOP K3 untuk kegiatan operasional di lapangan dan Prosedur terkait pencegahan COVID-19, dan telah tersedia penanggungjawab pelaksana K3 yaitu telah terbentuknya P2K3 yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah melalui Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: KEP.03/DISNAKERTRANS//2018 tanggal 04 Januari 2018 dan terdapat pembaharuan P2K3 yang telah disahkan melalui Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: KEP.43/DISNAKERTRANS/III/2020 tanggal 11 Maret 2020. Selain itu terdapat SATGAS Pencegahan COVID-19 yang ditetapkan melalui Surat Keputusan camp Manager No.035/CM/SK/EDL-II/V/2020 tanggal 17 Mei 2020. Implementasi penerapan K3 dan Pencegahan Covid-19 dengan penerapan protocol kesehatan telah dilaksanakan
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3	<b>Memenuhi</b>	PT Erna Djuliawati telah memiliki peralatan K3 yang disediakan oleh perusahaan berupa alat pelindung diri (APD) untuk seluruh karyawan yang sesuai dengan kondisi masing-masing bagian di lapangan. Hasil verifikasi terkait dengan kondisi peralatan maupun kelengkapan lainnya berdasarkan data inventarisasi masih berfungsi dengan baik
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	<b>Memenuhi</b>	PT Erna Djuliawati telah mempunyai dokumen catatan kecelakaan kerja dan terdapat upaya-upaya yang dilakukan untuk menekan terjadinya kecelakaan kerja, berupa pendistribusian alat pelindung diri kepada karyawan yang beraktivitas di tempat kerja, pemasangan spanduk himbauan untuk mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja, sosialisasi tentang keselamatan dan kesehatan kerja
<b>Indikator 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	<b>Memenuhi</b>	Karyawan PT Erna Djuliawati telah memiliki serikat pekerja yang tergabung dalam PUK KAHUT Indonesia K.SPSI PT Erna Djuliawati Logging Unit II. Hasil verifikasi diketahui susunan pengurus serikat pekerja telah di

		perbaharui dan telah di setuju dan telah terdapat Surat Keputusan dari Kepala Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Seruyan Nomor: 560/1064/DISNAKERTRANS/VII/2020 tanggal 31 Agustus 2020 tentang Pencatatan Serikat Pekerja PT Erna Djuliawati Unit II
<b>Indikator 5.2.2.</b> <b>Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja</b>		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	<b>Memenuhi</b>	PT Erna Djuliawati telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 2020 – 2022 telah disahkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : KEP.114/HI.03/IX/NAKERTRANS/2020 tentang Pendaftaran PKB PT. Erna Djuliawati Logging Unit II dengan Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja Kahut Indonesia (PUK SP Kahut Indonesia KSPSI) tanggal 01 September 2020. Perjanjian Kerja Bersama berlaku sejak tanggal 29 Oktober 2018 s/d 28 Oktober 2020.
<b>Indikator 5.2.3.</b> <b>Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)</b>		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur	<b>Memenuhi</b>	Hasil verifikasi diketahui bahwa karyawan yang bekerja di areal PT Erna Djuliawati tidak terdapat karyawan yang masih berusia di bawah 18 tahun. Hasil Pemeriksaan Laporan Tenaga Kerja dan pemeriksaan tenaga kerja di lokasi kerja diketahui PT Erna Djuliawati sampai kegiatan penilikan ke-3 jumlah karyawan sebanyak 978 orang, terdiri dari Dept Produksi 277, Pekerja ML D 234, Pekerja FE & OA 179, Pekerja Dept. PGA 158, Pekerja DPH 122, Dept. PMDH 16

Depok, 11 November 2020

No. : 342.3/SKEP-MUTU/XI/2020  
Lamp. : 1 (satu)  
Perihal : Keputusan Hasil Penilikan Ke-3 Penilaian Kinerja PHPL PT Erna Djuliawati

Kepada Yth.

**Direktur PT Erna Djuliawati**

Lyman Wing, Kota BNI, Jl. Jend. Sudirman Kav 1, Jakarta 10220

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan keputusan hasil Penilikan Ke-3 Penilaian Kinerja PHPL pada PT Erna Djuliawati sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPPHPL-008/MUTU/FM-006  
Masa Berlaku Sertifikat : 06 November 2017 s/d 05 November 2022  
Ruang Lingkup :  
a. SK IUPHHK-HA : Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 15/KPTS-IV/1999 Tanggal 18 Januari 1999  
b. Luas : ± 184.206 Ha  
c. Lokasi : Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah  
Tanggal Penilikan : 14-16, 19-22 Oktober 2020  
Tim Audit : Fauzi Prima Sanusi, S.Hut (Lead Auditor/Bid. Ekologi),  
Asep Kurniawan, S. Hut (Auditor Bid. Prasyarat),  
Wuri Pratini Hawiati, S. Hut (Auditor Bid. Produksi),  
RR. Arwita Andharu, S. Hut (Auditor Bid. Sosial),  
M. Arief Hidayat, S.Hut (Auditor Bid. VLK)  
Standar : Peraturan Direktur Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 (Lampiran 1.1 dan Lampiran 2.1)  
Surat Edaran Direktur Jendral Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SE.05//PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.  
Hasil Penilikan :  
a. Nilai kinerja indikator PHPL : 96,97% dengan predikat **"Baik"**  
b. Standar VLK : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi norma penilaian  
c. CARs : -  
Status Sertifikat : Tetap berlaku  
Jadwal Penilikan Ke 4 : September 2021

Demikian hasil ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Hormat kami,  
**mutu**  
international

**Irham Budiman**  
Direktur

MUTU-4140GH/1.3/07072020

Head Office & Laboratory :

Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16453 Indonesia

Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46

Email : [mutu@mutucertification.com](mailto:mutu@mutucertification.com) Website : [www.mutucertification.com](http://www.mutucertification.com)